

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, EFEKTIVITAS, DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PEKALONGAN

(Studi Kasus Pada Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan)

Satifa Salsabillah¹, Yohani², Rini Hidayah³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Satifasasa2345@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan daerah adalah aktivitas yang berupa rencana, pelaksanaan, tata usaha, laporan, dan tanggung jawab penggunaan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus Pada Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan). Penelitian ini mengambil populasi BPKD Kabupaten Pekalongan. Metode purposive sampling sehingga diperoleh 35 responden. Teknik analisis regresi linear berganda, dengan melalui uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, pengujian hipotesis melalui uji parsial, uji simultan dan koefisien regresi menggunakan software SPSS Versi 22. Hasilnya menandakan jika pengujian hipotesis secara parsial variabel Akuntabilitas (AK1) mempengaruhi signifikan dan positif terhadap Pengelolaan keuangan daerah, variabel Transparansi (TR2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pengelolaan keuangan daerah, Efektivitas (EF3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pengelolaan keuangan daerah dan variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM4) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pengelolaan keuangan daerah (Y). Koefisien determinasi sebesar 95,6% berarti kompetensi seluruh variabel bebas berupa akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan Sumber daya manusia dalam menjelaskan variabel terikat berupa pengelola keuangan keuangan sebesar 14,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar regresi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

***THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY,
EFFECTIVENESS, AND HUMAN RESOURCE CAPACITY ON
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN PEKALONGAN
DISTRICT (CASE STUDY AT THE BPKD OFFICE OF
PEKALONGAN REGENCY)***

Abstract

Regional financial management is an activity in the form of planning, implementation, administration, reports and responsibility for the use of regional finance. The purpose of this research is to determine the influence of Accountability, Transparency, Effectiveness, and Human Resources Capacity in Regional Financial Management in Pekalongan Regency (Case Study at the Pekalongan Regency BPKD Office). This study took the population of BPKD Pekalongan Regency. The purposive sampling method obtained 35 respondents. Multiple linear regression analysis techniques, using classic assumption tests in the form of normality tests, multicollinearity tests and heteroscedasticity tests, hypothesis testing through partial tests, simultaneous tests and regression coefficients using SPSS Version 22 software. The results of this study indicate that the results of partial hypothesis testing of the Accountability variable (AK1) have a significant and positive effect on regional financial management, the Transparency variable (TR2) has a significant and positive effect on regional financial management, Effectiveness (EF3) has a significant and positive effect on regional financial management and the Human Resources Capacity variable (HR4) has a significant and positive effect on regional financial management (Y). The coefficient of determination of this study is 95.6%, which means that the competence of all independent variables in the form of accountability, transparency, effectiveness, and human resources in explaining the dependent variable in the form of financial management is 14.4% and the remainder is influenced by variables outside the regression.

***Keywords:* Accountability, Transparency, Effectiveness, Human Resources CapacityRegional Financial Management**

PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan instansi yang memproses keuangan berupa rencana, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pantauan keuangan tiap daerah. Data dokumen dalam peraturannya, diserahkan dalam bentuk dokumen penjelasan yang mencontohkan gambaran dinamika informasi yang dibutuhkan dalam setiap tahapan pengelolaannya. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah yakni sumber pendapatan melalui pengelolaan kekayaan daerah perseorangan dan pendapatan lainnya yang sah. (Mardiasmo, 2011: 1)

Setiap daerah otonom memiliki tugas dan wewenang dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Bisma *et al*, 2010).). Berdasarkan PP No 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka suatu daerah berhak mengatur semua proses di dalamnya, diantaranya yaitu perencanaan, anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan pengawasannya. Keuangan Daerah antara lain: Hak Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan pajak dan pinjaman, kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan Daerah dan membayarkan urusan dengan pihak lain, penerimaan, kekayaan, pengeluaran daerah diberdayakan dalam bentuk tunai, surat berharga,

utang ataupun hak lainnya yang bisa ditukarkan tunai, termasuknya kekayaan terpisah serta diambil alih oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dan berjalannya proses kegiatan pemerintahan (PP No. 77 Thn 2020)

Tata kelola keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari cara menyelenggarakannya, dimana hal tersebut menjadi aspek dasar yaitu transparansi. Adanya keterbukaan terhadap masyarakat tentang tata kelola keuangan menandakan adanya perwujudan tata kelola yang baik. Beberapa tolak ukur tata kelola pengelolaan keuangan antara lain akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, dan kapasitas SDM. Menurut Mardiasmo (2009) keterbukaan informasi berdasarkan kebebasan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik. Transparansi dijalankan agar masyarakat mengetahui adanya pengelolaan keuangan tersebut dilakukan secara terbuka. Proses pengelolaannya dilakukan dengan tertib, efisien, efektif, terbuka dengan tetap mementingkan keadilan, kepatutan, bermanfaat, dan taat pada Undang-Undang (Peraturan RI No. 12 Pasal (3) Thn 2019).

Ada wilayah yang sudah mengeluarkan peraturan daerah mengenai transparansi dan partisipasi masyarakat (perda) sebelum diterbitkan berdasarkan PP No. 77 Tahun 2020 mengenai pengelolaan

keuangan daerah dan tentang transparansi informasi publik. Namun di sisi lain, terdapat daerah-daerah yang peraturannya tidak memberikan hukuman yang mengakibatkan sulit tercapai transparansi dalam proses penegakannya (Ridha dan Basuki, 2012). Pengendalian keuangan yang diterapkan secara tidak tepat menimbulkan dampak negatif, terutama permasalahan terkait Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, dan kinerja manusia, sehingga menyebabkan pelaporan yang tidak akurat (Asroel, 2016)

Kabupaten Pekalongan menyajikan laporan keuangan dengan baik, dalam pencapaian WTP (wajar tanpa pengecualian) masih tersirat masalah yang perlu diperbaiki. Hal ini dikemukakan ada berbagai masalah dalam proses pengelolaan keuangan Kabupaten Pekalongan yang menunjukkan perlunya peningkatan akuntabilitas, transparansi serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah namun masih ditemukan beberapa masalah dalam pelaporan yang disajikan. Ada indikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi di proses transparansi pelaporan keuangan. Banyak masalah yang timbul dalam Penetapan Kebijakan bagian pengolahan dana, aset, dan pendapatan hal ini disimpulkan dalam pengelolaan keuangan masih belum didapatkan transparansi dalam menerapkan pelaporan keuangan. (Renstra BPKD Kabupaten Pekalongan, 2021).

Transparansi pengelolaan keuangan daerah sangat penting saat ini, Masyarakat mengharapkan

otonomi daerah mampu dengan tepat dan berpengaruh dalam proses mengelola keuangan daerah, kualitas pelayanan publik yang terus meningkat dan kesejahteraan Masyarakat, serta dapat memberi bagian partisipasi Masyarakat di proses Pembangunan (Putra, 2016). Sistem yang dimaksud adalah mendengarkan dan menampung segala aspirasi publik serta menjalin kerjasama memberdayakan masyarakat, menata kembali regulasi internal, dan marketization layanan (Putra, 2016). Tiap sistem ini berhubungan satu sama lain dan mendorong untuk menciptakan efek pengelolaan keuangan daerah.

Efektivitas berkaitan dengan peningkatan dana yang perlu dilakukan dengan tepat dan cermat. Hal ini merupakan wujud nyata pertanggungjawaban dari pemerintahan daerah, bahwa kinerja yang maksimal merupakan hasil dari penggunaan anggaran daerah secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan demi kepentingan masyarakat setempat (Rahman dan Feri, 2022)

Penerapan pelaporan keuangan dianggap baik ketika efektivitas organisasi yang tinggi, efektivitas adalah ketika suatu pemerintah mampu memaksimalkan penggunaan dana publik secara tepat dan sesuai tujuan demi kepentingan masyarakat. Untuk mencapai transparansi dalam pelaporan keuangan, organisasi yang baik tidak hanya fokus pada efektivitas, namun juga akuntabilitas.

Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik memiliki banyak manfaat, antara lain

mendorong efektivitas pengelolaan keuangan publik dalam optimalisasi kepercayaan masyarakat pada pemerintah, memastikan penggunaan sumber daya manusia yang tepat dan menghindari tindakan korupsi, serta memungkinkan adanya pengambilan kesepakatan terbaik dan lebih rasional pada pengelolaannya (Edowaye, Mikael et al 2021).

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban dalam melaporkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan pihak yang berwenang dalam meminta hasil laporan tersebut. Akuntabilitas yang semakin tinggi di suatu perusahaan dianggap mampu meningkatkan transparansi juga. Akan tetapi, diperlukan pula kemampuan yang tinggi dalam memprediksi laporan keuangan di masa depan dengan berbagai pertimbangan diantaranya yaitu SDM.

Kapasitas SDM dilihat sebagai komponen untuk melakukan dan mengevaluasi kinerja dan kualitas dalam menyelesaikan suatu fungsi. Termasuk Akuntansi, yang dibuktikan dengan tingkat tanggung jawab dan kemampuan SDM. Tanggung jawab dinilai dari tupoksi tugas dan posisi yang jelas, tanpa didasari bagian yang jelas maka SDM belum bisa menjalankan fungsinya (Rioni dan Dwi S. 2019)

Perkembangan sektor publik dapat dilihat dari tuntutan kinerja akuntan publik yang semakin meningkat. Hal ini berhubungan dengan pentingnya transparansi dan penyediaan informasi pada

masyarakat untuk memenuhi hak-hak mereka (Mardiasmo, 2011).

Akuntabilitas mengenai laporan keuangan tidak cuma membahas penyajian laporannya. Dalam hal ini, laporan memuat informasi yang sesuai dan tidak hanya melengkapi kebutuhan, tetapi juga mencakup hasil yang tersedia langsung dan bisa dilihat masyarakat yang membutuhkan informasi (Steccolini, 2002 dalam Aliyah dan Nahar, 2012). Akuntabilitas yang efektif tidak hanya bergantung pada penyajian laporan keuangan, namun juga pada informasi yang relevan dalam laporan keuangan yang tersedia. Dimana Masyarakat mempunyai hak untuk menuntut informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas sebagai pihak yang mempercayai pemerintah. Pencapaian laporan keuangan mengacu pada mudahnya mengakses informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Publik merupakan pihak yang mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada pemerintah dan berhak menerima segala informasi laporan keuangan guna tindak lanjut terhadap kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2002)

Faktanya, ketika Badan Pengawas Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan sering ditemukan masalah dalam mengelolanya, dan akuntabilitas yang masih lemah. Dalam permasalahan pengelolaan masih ditemukan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, belum terbukti efektif, antara lain seperti, dalam

pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, aset, TI dan khususnya pada staf pengelola TI serta pereviu LKPD yang belum mengikuti pelatihan dan yang belum sepenuhnya memiliki pemahaman konsep dasar akrual. Hal ini disimpulkan laporan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan keadaan dikarenakan kurangnya pemahaman dalam konsep penulisan laporan (Renstra BPKD Kabupaten Pekalongan, 2021).

Fakta ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah masih minim yang berpeluang mengalami kebocoran serta mengganggu kinerjanya. kurangnya akuntabilitas dalam laporan keuangan bukan hanya informasi yang dimuat tidak semuanya relevan. Akan tetapi, laporannya tidak secara langsung tersedia dan akses yang kurang memadai. Akibatnya penyampaian laporan keuangan yang kurang dan tidak dapat diakses dapat mempengaruhi kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. (BPKD Kabupaten Pekalongan, 2021)

Pemerintah Kabupaten atau kota saat melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan, standar, norma, instruksi dan standar yang berasal dari pemerintah pusat untuk menjamin pembangunan nasional tetap terjaga. Sedangkan, dalam memajukan pembangunan daerah, dibentuk Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) berpegang pada fungsi pemerintah daerah yakni melaksanakan tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan tuas dalam

pelayanan publik, Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, pemerintah daerah memanfaatkan beberapa sumber dana yakni dana penghasilan asli daerah, dana bagian umum khusus, dan dana bagi hasil. Maka, pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan melaporkan segala kegiatan dan tindakan yang berkaitan dengan serah terima dan pemanfaatan dana masyarakat yang mempunyai hak kewajiban menerima tanggung jawab Dalam hal ini, DPRD berkewajiban untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat luas. (Renstra BPKD Kabupaten Pekalongan, 2021).

Keberhasilan tolak ukur dalam mengelola keuangan yaitu akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. pengelolaan keuangan menurut sistem akuntansi pemerintah yang mencangkup ukuran standar pengelolaan serta standar tercapai sasaran target pembangunan dan dapat digambarkan dengan *Good Government*. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dipertimbangkan karena mengingat kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang sulit dari sudut pandang publik. Sehingga, hal-hal yang mempengaruhi proses pengelolaan keuangan daerah menjadi daya tarik peneliti untuk menelitinya.

Fenomena ini masih menarik untuk diteliti, terbukti masih adanya beberapa peneliti yang meneliti masalah ini. Seperti penelitian Ivana Diva Chris Ninditya (2021), menyimpulkan jika variabel akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh yang

signifikan pengolahan dana, dan variabel efektivitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana daerah. Peneliti lain Dani Choirun Nisak (2017) menyimpulkan bahwa adanya efek efisiensi, transparansi, akuntabilitas dalam mengelola dana pada keaktifan sekolah secara simultan dan parsial Erwi Saraswati (2018) menyimpulkan bahwa pengelolaan dana di beberapa daerah Jawa Timur relatif kurang efisien dan efektif. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik tentang pengawasan yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan yang dilaksanakan perlu pengawasan agar tetap efisien, efektif, dan ekonomis. Pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan sesuai tujuan dan rencana dalam pengawasan juga mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan atas terhadap bawahan.

Penulis tertarik pada fenomena yang terjadi di atas sehingga menarik peneliti untuk melakukan studi **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, EFEKTIVITAS, DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PEKALONGAN (Studi Kasus Pada Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan).”** hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui akuntabel, efektivitas sektor publik yang cukup baik oleh instansi pemerintah daerah dan transparansi kualitas laporan kinerja yang cukup optimal serta kapasitas sumber daya manusia dari

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori keagenan mendeskripsikan korelasi antara *principal* (pemilik) dengan *agency* (manajemen). Pada organisasi sektor publik, pemerintah yaitu badan eksekutif sebagai agen dan masyarakat lewat DPRD sebagai prinsipal. Secara tidak langsung Teori Agensi sebenarnya sudah dilaksanakan di Indonesia, *principal* adalah pemerintah DPRD yang akan mewakili masyarakat, serta *agent* dalam hal ini adalah pegawai eksekutif bupati dan pegawai BPKD. (Krisniaji & Rahmawati, 2021).

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai prinsip pertanggungjawaban terhadap segala transaksi yang telah dilakukan. Semua transaksi yang dilakukan juga dicatat sesuai dengan yang di lapangan. Maka dari itu, akuntabilitas membawa pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah seperti pencatatan semua transaksi yang lebih mudah ditelaah. Dengan adanya akuntabilitas, nilai detail dari pencatatan transaksi akan semakin baik dan berdampak pada pengelolaan keuangan instansi pemerintah daerah.

Adanya prinsip akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas mengelola keuangan yang lebih baik, pemerintah daerah dan pusat wajib melaporkan segala proses menyelenggarakan pengelolaan

keuangan. Kewajiban ini membuat pemerintah agar menjalankan pengelolaan keuangan secara baik sesuai dengan undang-undang yang ada. Akuntabilitas juga perlu dalam rangka memberikan kepastian pengelolaan tersebut berkualitas baik dan terpercaya.

Dalam proses penyajian laporan pengelolaan keuangan, semakin akuntabel laporan pengelolaan keuangan yang disajikan akan semakin baik laporan yang dilaksanakan. Begitu juga sebaliknya, apabila laporan pengelolaan keuangan yang disajikan tidak akuntabel maka proses pengelolaan keuangan yang dilakukan juga kurang baik, karena akuntabilitas dibutuhkan untuk bisa memberi kepastian bahwa laporan keuangan yang diberikan itu kualitasnya baik. Hal ini juga diharapkan dengan semakin akuntabel suatu proses pengelolaan keuangan maka praktek terjadinya pelanggaran dan penyelewengan anggaran dalam pengelolaan keuangan dapat diminimalisir (Kementerian Keuangan RI. 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan Chris Ninditya & Setiawati, (2021), Mutia, (2021) dan Farhan, (2019) dimana menyatakan bahwa akuntabilitas mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Maka dapat diajukan hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Akuntabilitas (AK1) mempengaruhi secara signifikan pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) di Kabupaten Pekalongan.

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi yakni demokrasi yang mendasar karena masyarakat bisa melihat dengan jelas dan terbuka kegiatan dari pemerintah dibandingkan dengan merahasiakan kegiatan tersebut. Transparansi juga bermakna terbukanya pemerintah dalam memberi informasi proses pengelolaan berlangsung.

Hubungan antara transparansi dengan pengelolaan keuangan daerah sangat berkaitan. Semakin transparan dalam tahapan pengelolaan keuangan sehingga diharapkan terus meningkat tahapannya pengelolaan keuangan yang dilakukan dari rencana, penganggaran, pelaksanaan, ketatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Pelanggaran dan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan anggaran juga dapat dicegah dengan adanya transparansi, dimana masyarakat bisa menilai secara langsung bagaimana proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah dan juga menjadi akses publik mengenai aktivitas pemerintahan, yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sebagian studi terdahulu seperti yang dilaksanakan AA Gde Oka Kadek Nurdarmasih, dkk (2019) Jamaludin (2022) dan Achmad Farhan (2023) dimana menyatakan bahwa mempengaruhi secara positif pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis pada studi ini adalah:

H2 : Transparansi (TR2) mempengaruhi dengan signifikan pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) di Kabupaten Pekalongan.

Pengaruh Efektivitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Efektivitas yang berarti tahap pencapaian hasil dari target yang ditentukan. efektivitas biasanya berhubungan dengan tolak ukur yang menjadi suatu sasaran tujuan. Target keberhasilan instansi adalah apabila instansi mampu mencapai tujuan yang sesuai dengan tupoksi dan tugas yang ada. Laporan keuangan menjadi hal penting yang berperan untuk memberi informasi ke pihak yang bersangkutan. Sehingga, efektivitas di laporan keuangan mampu melihat keuangan tersebut telah berjalan sesuai target.

Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, efektivitas sangat mempengaruhi tujuan pelaksanaannya dari pengolahan sampai pada target yang akan dituju. Semakin tinggi tingkat efektivitas dalam proses pengelolaan keuangan maka pengelolaan keuangan yang dilakukan juga semakin tepat dan berpengaruh. Efektifnya pengelolaan keuangan diharapkan bisa mencegah terjadinya pemborosan (*mark up*) dalam proses penyusunan dan realisasi anggaran. Karena efektivitas dilihat dari tanggung jawab yang telah diterima dan hasil dari pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif akan mencapai target untuk kepentingan masyarakat

Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan Anton Trianto (2016), Erwin Saraswati (2018), dan Ivana Diva Chris Ninditya (2021) dimana menyatakan bahwa efektivitas mempengaruhi secara signifikan dan

positif pada pengelolaan keuangan daerah. Sehingga hipotesis pada studi ini:

H3 : Efektivitas (EF3) mempengaruhi secara signifikan pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) di Kabupaten Pekalongan

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Kapasitas SDM yakni kapasitas dalam melaksanakan tugasnya agar tercapainya tujuan (Karmila, 2013). Kapasitas harus mampu mencapai kinerja yang memiliki *output* dan *outcomes*. Tjiptoherijanto dalam Widyaningrum dan Rahmawati (2010) menjelaskan jika kompetensi SDM dan *level of responsibility* bisa digunakan sebagai indikator penilaian dari kinerja dan kualitas kapasitas dari SDM .

Pengelolaan keuangan daerah mampu dianggap bernilai jika informasi keuangan yang ditampilkan mudah untuk dipahami. Tetapi sampai saat ini menunjukkan masih minimnya SDM yang kurang berpengalaman dan tidak sesuai dengan *job description*. Meskipun sistem yang ada sudah kompeten tetapi sumber daya manusianya belum memenuhi kapasitas, maka dapat menimbulkan hambatan yang dapat menghasilkan kualitas yang rendah. Karena apabila kualitas Sumber daya manusia rendah maka potensi penyelewengan anggaran dalam pengelolaan keuangan juga semakin besar dan dapat berakibat pada laporan keuangan. Karenanya,

kapasitas SDM harus dianggap sebagai cara meningkatkan kualitas kinerja dalam penyajian laporan keuangan, menghasilkan keluaran dan hasil yang bersifat positif. Yang dimaksud berkualitas di sini seperti Sumber daya manusia yang mempunyai akademik yang tinggi dan kompeten dalam mengelola keuangan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan Sari dan Banu (2014) dan Yendrawati (2013) mengatakan jika kapasitas sumber daya mempengaruhi signifikan dan positif pada pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis pada penelitian ini adalah:

H4 : Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM4) mempengaruhi secara signifikan pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) di Kabupaten Pekalongan.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah yakni kewajiban serta hak di kegiatan pemerintahan dan diukur dari uang dan semua jenis penghasilan di daerah yang mampu menjadi aset daerah tersebut. Prinsip pengelolaannya yaitu transparan, tertib, efisien dan efektif, ekonomis serta tanggung jawab.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik memiliki banyak manfaat, antara lain mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik, meningkatkan kepercayaan publik

terhadap pemerintah, memastikan penggunaan sumber daya publik yang tepat dan menghindari tindakan korupsi, serta memungkinkan adanya pengambilan kesepakatan terbaik dan lebih rasional dalam mengelola dana publik.

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, mengembangkan akuntabilitas serta keterbukaan mengelola dana daerah, juga pengawasan dan evaluasi pada pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penguatan kompetensi SDM pada pengelolaan keuangan daerah juga sangat penting dalam meningkatkan ketepatan mengelola dana daerah. Banyaknya mengelola dana daerah disamping sumber daya yang sedikit. Hipotesis pada studi ini adalah :

H5 : Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (X5) mempengaruhi secara signifikan pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) di Kabupaten Pekalongan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif dipakai dalam studi ini. Kuantitatif yaitu cara penelitian dimana data yang di pakai data yang konkrit (*positivistic*), yaitu berupa angka yang diukur dengan cara statistika sebagai instrumen pengujian perhitungan, dan berhubungan dengan berbagai masalah yang diteliti bertujuan untuk

mendapatkan sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2018).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian berlangsung di kantor BPKD Kabupaten Pekalongan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Riset ini populasinya mencakup semua pegawai kantor BPKD Kabupaten Pekalongan. Teknik sampel yang dipakai yakni *purposive sampling* dan kriteria penelitian sebagai berikut:

1. Perangkat BPKD yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Sub Bagian.
2. Minimal masa kerja 1 tahun dan minimal tingkat pendidikan Perguruan tinggi D3/S1 Sederajat.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Riset ini datanya bersumber dari data primer. Data tersebut merupakan asli data yang diperoleh penulis dari sumber langsung yang menimbulkan suatu masalah penelitian tertentu (Istijanto, 2018). Teknik data yang dikumpulkan sebagai berikut:

Kuesioner merupakan teknik mengumpulkan data yang menghubungkan pengajuan deretan pertanyaan laporan tertulis untuk ditanggapi oleh responden.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik ini dipakai agar mendapatkan suatu penjelasan dari data berupa nilai minimal, maksimal, mean, dan standar deviasi. Untuk mendapatkan hasil analisis dari statistik deskriptif (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini dengan cara pendekatan *kolmogorov-smirnov* (K-S) variabel dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansinya $>$ atau sama dengan 0,05. Sebaliknya jika signifikansi $<$ 0,05 maka variabel dianggap tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

Uji Multikolinearitas

Nilai tolerance dan VIF menjadi landasan uji ini, nilai VIF yang lebih rendah dari 10 dan nilai tolerance lebih tinggi dari 0,01 tidak adanya multikolinearitas dan juga sebaliknya (Ghozali, 2018).

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bisa dihitung memakai grafik *scatterplot* yakni SRESID dengan residual *error* yakni ZPRED. Prinsip pada hasilnya yakni, jika terdapat pola titik khusus dan polanya beraturan sehingga dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas, selanjutnya berpola tidak jelas, atau titik yang berada di atas dan bawah angka 0

pada sumbu Y, dikatakan tidak adanya heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda dapat dipakai dalam menguji suatu Variabel dependen yaitu (Y) dan variabel independen nya meliputi (AK1), (TR2), (EF3) serta (SDM4). Rumus yang dipakai pada yakni:

$$Y = a + b_1AK1 + b_2TR2 + b_3EF3 + b_4SDM4 + e$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Keuangan Daerah

a = konstanta

b₁ = koefisien regresi variabel Akuntabilitas (AK1)

b₂ = koefisien regresi variabel Transparansi (TR2)

b₃ = koefisien regresi variabel Efektivitas (EF3)

b₄ = koefisien regresi variabel Kapasitas SDM (SDM4)

AK1 = Akuntabilitas

TR2 = Transparansi

EF3 = Efektivitas

SDM4 = Kapasitas Sumber Daya Manusia

e = error

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Pada hal ini nilai signifikannya nya 0,05. Ho bisa

diterima dan Ha ditolak jika nilainya > 0,05. Maka, tidak ada pengaruh antara kedua variabel. Apabila, Ho diterima dan Ha ditolak jika nilainya < 0,05. Maka, diantara variabel bebas dan terikat ada pengaruh.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Nilai yang dipakai yakni 5%, jika nilainya $f < 0.05$ bermakna secara seluruh dari variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya (Ghazali, 2016).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji ini dipakai dalam menentukan dan melihat besaran pengaruhnya variabel *independen* secara bersamaan pada variabel *dependen*. Nilainya antara 0 dan 1. Jika dekat angka 1 dapat dikatakan makin baik. (Ghozali, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Responden yang diambil dari populasi berjumlah 35 responden, Adapun sampel diambil teknik *purposive sampling* yakni memilih responden yang ahli mengetahui masalah yang akan diteliti. Dari penjelasan tersebut maka sampel dari riset ini yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Sub Bagian. Berdasarkan Perda No. 27 Thn 2022 Mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPKD Kabupaten

Pekalongan Tahun 2021 (BPKD Kabupaten Pekalongan, 2021) :

1. Perangkat BPKD terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Sub Bagian.
2. Minimal 1 tahun masa kerja dan minimal pendidikan Perguruan tinggi D3/S1 Sederajat.

Tabel 4.1 Daftar Responden

No	Responden	Total
1	Kepala Badan BPKD	1
2	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	2
3	Sub Bagian Umum dan Pembukuan	2
4	Bidang Perencanaan dan Penetapan	6
5	Bidang Pelayanan dan Penagihan	6
6	Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	6
7	Bidang Akuntansi dan Pembukuan	6
8	Bidang Aset	6
	Total	35

Sumber : Data primer yang diperoleh

Deskripsi tabel 4.1 kriteria sampel tersebut dirincikan antara lain: Kepala Badan BPKD sebanyak 1 responden , Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 2 responden, Sub Bagian Umum dan Pembukuan sebanyak 2 responden, Bidang Perencanaan dan Penetapan sebanyak 6 responden, Bidang Pelayanan dan Penagihan sebanyak 6 responden, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sebanyak 6 responden, Bidang Akuntansi dan Pembukuan sebanyak 6 responden dan Bidang Aset sebanyak 6 responden. Perolehan jumlah responden BPKD Kabupaten Pekalongan adalah 35 Responden berdasarkan Pekalongan No. 27 Thn 2022 mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPKD Kabupaten Pekalongan (BPKD Kabupaten Pekalongan, 2021).

Berikut disajikan data demografis sesuai karakteristik responden sebagai berikut :

Tabel 4.2 Demografi Jenis Kelamin Responden

Karakteristik Responden	Jenis	Total	Persen
Jenis Kelamin	1. Pria	18	51.4%
	2. Wanita	17	48.6 %
		35	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

Tabel 4.3 Demografi Pendidikan Responden

Karakteristik Responden	Jenis - Jenis	Jumlah	Presentase
Pendidikan	1. Diploma	6	17,1%
	2. Sarjana	29	82,9%
		35	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

Menurut tabel 4.2 responden terbanyak yaitu laki-laki yakni sebesar 18 responden (51,4%). responden Perempuan sebesar 17 responden (48,6%). Hal ini menunjukkan bahwa Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan kebanyakan pegawai laki laki. Sedangkan data kriteria responden sesuai pendidikan diketahui responden terbanyak berpendidikan sarjana yaitu sebanyak 29 responden (82,9%) sedangkan pendidikan Diploma sebanyak 6 responden (17,1%).

List Pendistribusian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang dibagikan	35	100%
Kuesioner yang ditolak	0	0%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang diolah	35	100%

(Data diolah, 2024)

Hasil Analisis data

Uji Statistik Deskriptif

Uji ini dipakai untuk mengukur total data (N), nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rerata, dan standar deviasi pada variabel terikat dan variabel bebas. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	35	29	45	35,89	4,357
Transparansi	35	19	35	26,60	4,306
Efektivitas	35	14	30	21,77	4,180
Kapasitas Sumber daya manusia	35	13	29	20,11	4,220
Pengelolaan Keuangan Daerah	35	18	34	25,37	3,926
Valid N (listwise)	35				

Sumber : data primer yang diolah, 2024

Menurut tabel 4.8 dapat dikatakan sampel yang dipakai pada penelitian ini yakni sebanyak 35 kuesioner. Variabel akuntabilitas (*independen*) nilai min yakni 29 dan nilai max yakni 45 nilai *mean* yakni 35,89 dengan nilai standar deviasi 4,357.

Variabel Transparansi nilai minimumnya 19 dan nilai maksimumnya sebesar 35 nilai *mean* 26,60 dengan nilai standar deviasi 4.306.

Variabel Efektivitas (*independen*) nilai minimumnya berjumlah 14 dan nilai maksimumnya 30 *mean*

21,77 dengan nilai standar deviasi sejumlah 4,180.

Variabel Sumber Daya Manusia (*independen*) memiliki nilai minimumnya 13 dan nilai maksimumnya 29 *mean* jumlahnya 20,11 dengan nilai standar deviasi sebesar 4,220.

Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (*dependen*) nilai minimumnya 18 dan nilai maksimumnya 34 nilai rata-ratanya 25,37 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,926.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas Data

Uji ini dipakai dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Data yang valid apabila pertanyaannya bisa dihasilkan dengan cara diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011).

Pengujian validitas menggunakan level of signifikan $\alpha = 5\%$ dengan kriteria apabila :

1. Instrumen valid jika r hitung $> r$ tabel
2. Instrumen tidak valid jika r hitung $< r$ tabel

software SPSS 20 *for window* dipakai menguji validitas di penelitian ini. berikut hasil uji validitas dari variabel Akuntabilitas, Transparansi , Efektivitas , dan Sumber Daya Manusia serta Pengelolaan Keuangan Daerah ada pada tabel ini :

Hasil Uji Validitas					
Variabel	Item	Tabel	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Akuntabilitas (AK1)	AK1.1	0.3338	0.899	0.001	Valid
	AK1.2	0.3338	0.797	0.008	Valid
	AK1.3	0.3338	0.877	0.000	Valid
	AK1.4	0.3338	0.794	0.000	Valid
	AK1.5	0.3338	0.895	0.001	Valid
	AK1.6	0.3338	0.794	0.000	Valid
	AK1.7	0.3338	0.899	0.001	Valid
	AK1.8	0.3338	0.899	0.001	Valid
	AK1.9	0.3338	0.797	0.008	Valid
Transparansi (TR2)	TR.1	0.3338	0.894	0.001	Valid
	TR.2	0.3338	0.666	0.004	Valid
	TR.3	0.3338	0.612	0.006	Valid
	TR.4	0.3338	0.874	0.000	Valid
	TR.5	0.3338	0.894	0.001	Valid
	TR.6	0.3338	0.874	0.000	Valid
Efektivitas (EF3)	EF.1	0.3338	0.878	0.001	Valid
	EF.2	0.3338	0.652	0.004	Valid
	EF.3	0.3338	0.679	0.006	Valid
	EF.4	0.3338	0.732	0.000	Valid
	EF.5	0.3338	0.879	0.001	Valid

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM4)	EF.6	0.3338	0.764	0.000	Valid
	SDM.1	0.3338	0.809	0.001	Valid
	SDM.2	0.3338	0.709	0.004	Valid
	SDM.3	0.3338	0.602	0.006	Valid
	SDM.4	0.3338	0.816	0.000	Valid
	SDM.5	0.3338	0.809	0.001	Valid
	SDM.6	0.3338	0.816	0.000	Valid
	PKD.1	0.3338	0.842	0.001	Valid
	PKD.2	0.3338	0.812	0.004	Valid
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	PKD.3	0.3338	0.768	0.004	Valid
	PKD.4	0.3338	0.608	0.006	Valid
	PKD.5	0.3338	0.785	0.000	Valid
	PKD.6	0.3338	0.842	0.001	Valid
	PKD.7	0.3338	0.785	0.000	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Pada tabel 4.9 menandakan jika hitungan keseluruhan instrumen > dari tabel 0.3338, maka disimpulkan jika semua instrumen valid dan bisa dipakai untuk penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji ini merupakan instrumen pengukuran kuesioner yang menjadi parameter dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden pada pertanyaan yakni stabil (Ghozali, 2007). Ketentuan keputusan dengan nilai kritis *cronbach alpha* yaitu > 0,60 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel dan bisa dipakai pada penelitian (Irawan, 2021).

Untuk menghitung Reliabilitas penelitian ini digunakan *software* SPSS 20.0. *for window*. Dilaksanakan uji validitas terhadap 35 data hasil

pengisian kuesioner. Adapun hasil uji reliabilitas dari variabel Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (variabel *independen*) serta Pengelolaan Keuangan Daerah (variabel *dependen*) dilihat dari tabel :

Hasil Uji Reliabilitas		
Variabel	Cronbach's Alpha	Presentase
Akuntabilitas (AK1)	0,950	Reliabel
Transparansi (TR2)	0,931	Reliabel
Efektifitas (EF3)	0,907	Reliabel
Kapasitas Sumber Daya manusia (SDM4)	0,911	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,933	Reliabel

Sumber : Data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil uji seluruh variabel nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0.60 . Sehingga, seluruh variabel dikatakan reliabel Imam Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini dipakai dalam menguji model regresi dapat berdistribusi normal atau tidak. Dasar uji *t* dan uji *f* memperkirakan jika nilai residual sesuai distribusi normal. Di mana data dinyatakan normalitas jika uji *kolmogorov smirnov* > 0.05 (Imam Ghozali, 2016). Hasil uji normalitas penelitian ini:

Hasil Uji Normalitas		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters	Mean	-.0326620
A ^b	Std. Deviation	.43098461
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.085
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data yang diolah, 2024

Pada tabel 4.11 nilai *Asymp Signifikansi (2-tailed)* > 0,5 sehingga data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji ini caranya dengan mengukur nilai tolerance dan VIF dari setiap variabel bebas. Jika nilai tolerance> 0,10 tidak terdeteksi *multikolinieritas*, dan begitu sebaliknya. Hasil uji di studi ini sebagai berikut :

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
<u>Akuntabilitas</u>	.064	15.584
<u>Transparansi</u>	.229	4.373
<u>Efektivitas</u>	.349	2.863
<u>Kapasitas Sumber daya manusia</u>	.082	12.211

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Data yang diolah, 2024

Pada tabel 4.12 variabel bebas penelitian nilai tolerance >0,10 artinya tidak ada hubungan antar variabel bebas. Kemudian untuk nilai VIF menandakan jika variabel independen memiliki nilai VIF < 10 artinya tidak ada keterkaitan antar variabel bebas. Sehingga, tidak ada *multikolinieritas* tiap variabel bebas pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bermaksud mengetahui residu model regresi bervariasi secara merata antar observasi atau tidak. Dengan memakai uji korelasi *Spearman's rho* maka dilakukan uji *heteroskedastisitas*. Apabila nilai Sig 2-tailed > 0,05 maka pengujian berhasil. (Sunnyoto, 2016). Hasilnya dapat diketahui:

Hasil Uji *Heteroskedastisitas*

Model	t	Sig.
1 (Constant)	2.437	.021
<u>Akuntabilitas</u>	-1.348	.188
<u>Transparansi</u>	.464	.646
<u>Efektivitas</u>	.466	.645
<u>Kapasitas Sumber daya manusia</u>	.262	.795

Sumber : Data yang diolah, 2024

Sumber : Data yang diolah, 2024

Pada data 4.13 signifikansi Akuntabilitas (AK1) 0,188 atau > 0,05. Variabel Transparansi (TR2) i nilai signifikansi 0,646 atau > 0,05 dan Efektivitas (EF3) nilai signifikansi 0,645 atau > 0,05. dan Sumber daya Manusia (SDM4) nilai signifikansi 0,795 atau > 0,05. Dari hasil tersebut tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas sehingga model itu tidak dapat ditolak .

Analisis Regresi Linier Berganda

Siregar (2018) mengatakan regresi linier sederhana yang dikembangkan, yaitu instrumen yang dipakai untuk memperkirakan

permintaan yang akan datang, didasarkan pada data masa. Diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.028	2.071		.014	.989
Akuntabilitas	.447	.136	.447	3.294	.003
Transparansi	.193	.073	.193	2.651	.013
Efektivitas	.416	.061	.416	6.860	.000
Kapasitas Sumber daya manusia	.269	.124	.269	2.166	.038

Persamaan regresi :

$$Y = a + \beta_1.AK1 + \beta_2.TR2 + \beta_3.EF3 + \beta_4.SDM4 + e$$

$$Y = 0,028 + 0,447.AK1 + 0,193.TR2 + 0,416.EF3 + 0,269.SDM4$$

Kesimpulan dari persamaan tersebut :

1. Nilai Konstanta (β_0) = 0,028 menandakan semua variabel lebih besar dari variabel terikat. Jika variabel bebas konstan, nilai Akuntabilitas sebesar 0,014
2. Nilai Koefisien Akuntabilitas (β_1) = 0,447 hal tersebut menandakan variabel Akuntabilitas berkontribusi positif bagi pengelolaan keuangan daerah, jadi makin baik tingkat akuntabilitas yang didapatkan, akan meningkatkan pula keputusan pegawai dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sejumlah 0,003 dan asumsi variabel lain tetap.
3. Nilai Koefisien Transparansi (β_2) =

0,193 hal tersebut menandakan jika variabel Transparansi berkontribusi positif bagi pengelolaan keuangan daerah , jadi makin baik tingkat Transparansi yang didapatkan, akan meningkatkan pula keputusan pegawai dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,013 dan asumsi variabel lain tetap.

4. Nilai Koefisien Efektivitas (β_3) = 0,416 hal tersebut menandakan bahwa variabel Efektivitas berkontribusi positif bagi pengelolaan keuangan daerah, makin baik tingkat Efektivitas yang didapatkan, akan meningkatkan pula keputusan pegawai dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sejumlah 0,000 dan asumsi variabel lain tetap.
5. Nilai Koefisien Kapasitas Sumber Daya Manusia (β_4) = 0,269 hal tersebut menandakan jika variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia berkontribusi positif bagi pengelolaan keuangan daerah, sehingga

makin baik Sumber Daya Manusia, akan meningkatkan pula keputusan pegawai dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sejumlah 0,038 dan asumsi variabel lain tetap.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji ini dipakai dalam mengukur pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu mengukur secara parsial dengan nilai signifikan yakni 0,05 (Aziz Mutahar, 2018). jika hasil signifikansi variabel bebas $< 0,05$ maka H_0 diterima. Ini menandakan jika variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Adapun hasilnya ada dalam tabel berikut :

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients					
Model	Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.028	2.071		.014	.989
Akuntabilitas	.447	.136	.447	3.294	.003
Transparansi	.193	.073	.193	2.651	.013
Efektivitas	.416	.061	.416	6.860	.000
Kapasitas Sumber daya manusia	.269	.124	.269	2.166	.038

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui :

1. Hasil pengujian hipotesis 1 (H1)

Berdasarkan tabel 4.15 hasil untuk variabel Akuntabilitas memperoleh nilai

0,447 dan nilai signifikansi 0,003. Nilai signifikansi variabel Akuntabilitas $< 0,05$ menunjukkan jika H1 diterima. Hal tersebut berarti variabel Akuntabilitas secara signifikan mempengaruhi pada Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Hasil pengujian hipotesis 2 (H2)

Hasil untuk variabel Transparansi (TR2) memperoleh nilai koefisien sebesar 0.193 dan signifikansi 0.013. Nilai signifikansi variabel PI $< 0,05$ menunjukkan jika H2 diterima. Hal tersebut berarti variabel (TR2) mempengaruhi secara signifikan pada Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Hasil pengujian hipotesis 3 (H3)

Hasil untuk variabel Efektivitas (EF3) memperoleh nilai koefisien 0.416 dan signifikansi 0.000. Nilai signifikansi variabel Efektivitas $< 0,05$ menunjukkan jika H3 diterima. Hal tersebut berarti Efektivitas signifikan dalam mempengaruhi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Hasil pengujian hipotesis 4 (H4)

Hasil uji Kapasitas Sumber Daya Manusia memperoleh nilai koefisien 0.269 dengan tingkat signifikansi 0.038. Nilai signifikansi variabel Sumber Daya Manusia $< 0,05$ menunjukkan bahwa H4 diterima. Hal tersebut berarti Sumber Daya Manusia mempengaruhi secara

signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Uji Simultan (Uji F)

Uji ini untuk mengukur pengaruh variabel bebas dan terikat secara bersamaan (Maulana Fikri, 2018). H_0 bisa diterima jika f hitung kurang dari 0,05. Hal itu menandakan jika seluruh variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi signifikan pada variabel terikat. Adapun hasilnya uji f dapat dilihat dalam tabel berikut :

Hasil Uji Parsial (Uji t)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	501.235	4	125.309	163.898	.000 ^b
Residual	22.937	30	.765		
Total	524.171	34			

Sumber : Data yang diolah, 2024

Sumber : Data yang diolah, 2024

Uji pada tabel 4.16 nilai signifikan 0.004. hasil signifikansinya $< 0,05$, maka dinyatakan jika seluruh variabel secara simultan mempengaruhi variabel terikat.

Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji ini dipakai untuk parameter besaran pengaruh semua variabel bebas pada variabel terikat. Adapun hasil perhitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini ada pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.978 ^a	.956	.950	.874

Sumber : Data yang diolah, 2024

Pada tabel 4.17 nilainya sebesar 0,978 berarti ada korelasi kuat antara variabel karena dekat dengan angka satu.

Koefisien determinasi *Adjusted R Square* 0,956, yang artinya kontribusi variabel bebas berpengaruh kepada variabel dependen sejumlah 95,6% dan 14,4% yakni sisanya dipengaruhi variabel diluar model seperti pengawasan intern dan kompetensi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kompetensi SDM terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kab. Pekalongan (studi pada Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan). Studi ini adalah kuantitatif memakai data sekunder sebagai sumber laporan pengelolaan keuangan daerah Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian dijabarkan di atas, maka kesimpulannya :

1. Berdasarkan uji t, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kompetensi SDM memiliki pengaruh kepada pengelolaan keuangan

daerah di Kabupaten Pekalongan.

2. Pada uji *Adjusted R Square*, setelah adanya Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pekalongan dapat terpengaruhi oleh Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, Kapasitas SDM 95,6 dengan sisanya 14,4 % dipengaruhi faktor lain.
3. Hasil analisis data dan uji hipotesis, sehingga bisa disimpulkan:
 - a. Variabel Akuntabilitas (AK1) secara positif dan parsial mempengaruhi pada variabel (Y). Dibuktikan dengan Uji t (parsial) variabel Transparansi yakni $0,003 < 0,05$ dan t hitung pada tabel hasil Uji t *coefficients* sebesar $3,294 > 1,6955$.
 - b. Variabel Transparansi (TR2) berpengaruh parsial dan positif terhadap Pengelolaan keuangan daerah (Y) di Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan . Hal ini dibuktikan variabel Transparansi yakni $0,013 < 0,05$ dan t hitung pada tabel hasil Uji t *coefficients* yakni $2,651 > 1,6955$.
 - c. Efektivitas (EF3) mempengaruhi secara parsial dan signifikan positif pada variabel

(Y). dibuktikan dari nilai variabel Transparansi yakni $0,000 < 0,05$ dan t hitung pada tabel hasil Uji t *coefficients* $6,860 > 1,6955$.

- d. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM4) secara parsial mempengaruhi signifikan dan positif pada variabel (Y). Hal ini dilihat dari Transparansi yakni $0,038 < 0,05$ dan t hitung pada tabel hasil Uji t *coefficients* sebesar $2,166 > 1,6955$.

Saran

Adanya ketidak sempurnaan studi ini, adapun saran untuk studi selanjutnya adalah :

1. Diharapkan untuk penambahan variabel lain untuk peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
2. Dalam mengumpulkan data metode yang dipakai berbeda dan menganalisis data serta menambah jumlah sampel agar hasil dari penelitian dapat digeneralisasikan.
3. Melakukan penelitian dengan pengambilan objek yang berbeda ataupun diperluas lagi agar dapat menggeneralisasikan

Pengelolaan keuangan daerah pada variabel dan faktor lainnya.

Referensi

- Anshori, M. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1*.
- Chrisninditya, I. D., & Setiawati, E. (2021). The Effect of Accountability, Effectiveness, and Transparency Government on Regional Financial Management. *Prosiding University Research Colloquium*, 0(0), 446–455. <https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1709>
- Farhan, A. (2019). Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2, 1–10.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas diponegoro.
- Halik, W., Nawawi, J., & Rusli, A. M. (2022). Implementasi Kebijakan Transparansi Bidang Pendidikan Di Kota Makassar. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(1), 10–26. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i1.284>
- Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i1.4963>
- Hilma Fadila, T., Manan, A., & Agustiani, E. (2023). Analysis of Effectiveness and Efficiency of Regional Financial Management in East Lombok District During and Post Covid-19. *JSD: Jurnal Sunan Doe*, 1(1), 2985–3877. <https://jurnal.institutsunandoe.ac.id/index.php/ESE>
- Jamaluddin, J., Muhammad Iqbal, Adri Patria, Zakaria Yahya, & Taufik Jahidin. (2022). Analisis Partisipasi Anggaran dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 414–420. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.542>
- Mutia. (2021). Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, Dan Pengetahuan Tentang Pajak Mahasiswa Prodi Studi Akuntansi Universitas Nusa Cendana Terhadap Pilihan Berkarir Di Bidang Perpajakan. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 9(2):131–43.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di

- Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107.
<https://doi.org/10.32500/jematec>
 h.v3i2.1283
- Notoadmojo, & S. (2021). Metodologi Penelitian Kesehatan. *Jakarta: PT. Rineks Citra*.
- Nursalam. (2017). No Title. In *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan (4th ed)*. Salemba Medika.
- Rahmadani, I. A., Setiawati, B., Publik, D. A., Tinggi, S., Administrasi, I., & Desa, P. K. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 3(1), 67–80.
- Riyanto, A. (2017). *Statistik Deskriptif* (Haikhi (ed.); 2nd ed.). Nuha Medika.
- Saraswati, E. (2020). Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 1021–2045.
- Sudyartini, Z. W. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Yogyakarta. *Journal on Education*, 06(03), 17807–17816.